**POKOK-POKOK KEINGINAN MENHAN YANG DISAMPAIKAN SECARA FORMAL MAUPUN INFORMAL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN KEKUATAN POKOK TNI**

1. Debat Capres Ke-3, tema “Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik”

Dalam Debat Capres Ke-3 Tanggal 7 Januari 2024, Bapak Prabowo Subianto menyampaikan visi-misi, yaitu:

1. Fungsi negara pertama adalah melindungi rakyat Indonesia.
2. Indonesia adalah negara kaya sehingga harus mengelola sumber kekayaan tersebut agar tidak diintervensi oleh negara lain.
3. Meneruskan sistem non-blok dengan meneruskan hubungan baik bersama negara-negara lain.
4. Menjalankan sistem politik tetangga yang baik.
5. Memperkuat pertahanan Indonesia agar menjadi negara yang dihormati oleh negara lain.

**Dalam Politik LN,** Pak Prabowo menyatakan bahwa Utang LN Indonesia dibandingkan PDB masih yang terendah di dunia (40%). Manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, strategi ekonomi yang tepat melalui hilirisasi membuat negara Indonesia berdaulat. Untuk mencegah intervensi asing kepada Indonesia, maka diperlukan pertahanan yang kuat, untuk patroli, satelit, dan seterusnya. Barang bekas keamanan Indonesia masih muda usianya.

**Pada sektor pertahanan,** Pak Prabowo menyatakan bahwa SDM menjadi penting dalam mendapat akses teknologi dan pengembangan guna memperkuat pertahanan Indonesia. Perlu adanya penguatan SDM yang menguasai Sains, teknologi, AI, dan cyber di Indonesia.

1. Rapim Kemhan

Dalam Rapim Kemhan tanggal 23 Februari 2024, sasaran visi misi pertahanan dan sasaran strategis Pertahanan Negara 2020-2024, yaitu:

Visi : Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Misi : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang professional.

Tujuan strategis:

1. Terjaganya kedaulatan negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan Keselamatan bangsa

**Sasaran strategisnya:**

1. Terjaganya kedaulatan negara

* wujudkan penataan ADIZ
* optimalkan interoperabilitas sarana dan prasarana intai dan pantau jarak jauh
* memperkuat kerjasama keamanan maritim
* dukungan usulan pengesahaan FIR ke ICAO
* penguatan operasi pengamanan wilayah darat, laut, udara

1. Terlindungnya keutuhan wilayah NKRI

**Membangun kewaspadaan dini melalui peningkatan kerjasama dengan K/L dan penguatan kapasitas lembaga intelijen**

1. Terlindungnya keselamatan segenap bangsa

* Peningkatan kesiapan professional TNI dalam penanganan RET, keadaan darurat, dan CBRNE
* Penanganan pandemic dan ancaman biologi lainnya serta membangun sarana riset
* Penyiapan SDM Hanneg D-3, S-1, S-2, S-3 dan smart campus infrastructure

1. Tingkatkan diplomasi Pertahanan

* Penguatan kerjasama pertahanan keamanan ASEAN, PBB, dan negara lain
* Penguatan kerjasama pertahanan di kawasan Pasifik Selatan
* Lanjutkan pengiriman pasukan perdamaian dunia yang profesional

1. Terbangunnya sishankamrata yang terintegrasi dan modern

**Sasaran strategisnya:**

1. Integritas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter

* Membangun sinergitas pertahanan militer, pertahanan nir militer di pusat dan daerah
* Penataan dan pengelolaan sistem pertahanan militer terpadu di Ibu Kota Baru (Kaltim)
* Peningkatan kapabilitas teknologi siber

1. Wujudkan postur pertahanan negara yang tangguh
2. Tatakelola sistem pertahanan negara yang baik

* Melanjutkan penyususunan per-UU bidang pertahanan
* Penguatan pengawasan pengelolaan anggaran (akuntabilitas, transparansi, bebas korupsi & efisiensi)
* Melanjutkan tata kelola pertahanan (pengendalian internal, penguatan reformasi birokrasi & percepatan zona integritas)
* Reformasi anggaran pertahanan sesuai rancangan pengembangan kekuatan pertahanan

1. Terwujudnya pengelolaan sumber daya nasional bidang pertahanan

**Sasaran strategisnya:**

1. Kesadaran bela negara seluruh WNI

* Melanjutkan rencana aksi nasional pembinaan kesadaran belneg (PKBN)
* Peningkatan peran K/L, TNI, POLRI, Pemda dan komponen bangsa lain

1. Wujudkan komponen pendukung

* Penataan dan pembinaan SDM, SDA/B dan Sarpras Nasional untuk dukungan pertahanan
* Tingkatkan kerjasama dengan K/L, Pemda, Pihak Swasta dalam pelayanan keveteranan RI
* Pembanguan Postur Komponen pendukung

1. Wujudkan komponen cadangan

* Pembentukan dan pembinaan Komcad
* Tingkatkan kerjasama dengan K/L, Pemda, Pihak Swasta dalam pembinaan Komcad
* Sistem Informasi Sumdahan Komcad dan Komduk
* Pembangunan Postur Komcad

1. Pemberdayaan industri pertahanqan nasional yang kuat, mandiri, berdaya saing

* Melanjutkan promosi kerjasama dan implementasi Jaksidklo dan Offset
* Melanjutkan Industri Pertahanan untuk kembangkan hasil litbang menjadi produk Alpalhankam
* Melanjutkan Koordinasi dengan K/L dan instansi terkait untuk peningkatan pemakaian Alpalhankam Produk Industri Pertahanan Nasional

1. Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan

**Sasaran strategisnya:**

1. Wujudkan ruang alat dan kondisi juang pertahanan negara
2. Wilayah pertahanan yang bertumpu pertahanan pulau besar
3. Desentralisasi depo logistik
4. Penguatan wilayah selat strategis
5. Sinergitas wilayah pertahanan
6. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (2022 s.d. 2045)
7. Draft Jakumhanneg 2025-2029

Visi dan Misi 2025-2029. Visi: Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi: Mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan berkelanjutan didukung kemandirian industri pertahanan, strategi pertahanan yang responsif dan adaptif serta kemampuan sumber daya manusia berbasis *Science, Technology, Engineering, Math* (STEM) untuk kepentingan pertahanan negara.

1. Mendorong percepatan terbitnya Undang-undang tentang Pengelolaan Ruang Udara (Nasional) yang diprakarsai oleh Kemhan-TNI dalam Prolegnas 2024.
2. Dalam berbagai Isu Geopolitik luar negeri dan dalam negeri :
3. Isu Taiwan : mendukung kebijakan “one China Policy” sehingga menghormati kebijakan Tiongkok dalam mengatasi permasalahan di kawasan tersebut, namun sangat konsern dengan efek konflik bila terjadi yang akan merusak keamanan kawasan dan antisipasi NEO.
4. Isu LCS : Mendukung pendekatan diplomasi dengan mendorong selesainya CoC pada level ASEAN-Tiongkok, kedalam terus membangun kekuatan matra Laut dengan pembelian Kapal-kapal Patroli dan melakukan operasi keamanan maritim dengan berkolaborasi TNI AL dan Bakamla, menekankan pentingnya pertahanan kuat, termasuk pengembangan platform dan satelit untuk memantau keadaan di LCS.
5. Isu Rusia Ukraina : Mendorong segera terjadi perdamaian dengan adanya gencatan senjata dan bila perlu membuat DMZ di wilayah antara Rusia dan Ukraina difasilitasi PBB.
6. Isu GAZA : Mendorong segera terjadinya perdamaian dengan adanya gencatan senjata dan segera melakukan operasi kemanusiaan terhadap korban konflik di pihak Palestina.
7. Isu AUKUS : menghargai peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan pihak Australia, namun konsen dengan bagaimana dapat menjaga keamanan di Kawasan bersama.

Pada prinsipnya sejalan dengan kebijakan kemenlu , menyayangkan dan prihatin adanya AUKUS yang terlihat sangat membahayakan keamanan Kawasan, karena bagaimanapun meningkatkan perlombaan senjata di Kawasan, Traktat Zona Bebas Senajata Nuklir Asia Tenggara (Traktat SEANWFZ) adalah komitmen untuk melestarikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir dan senjata pemusnah masal lainnya untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan internasional, hal ini akan terganggu. Ikut mengawasi melalui IAEA produksi yang dilakukan Australia dan AS dalam program AUKUS. Mendorong resolusi di PBB terhadap pembatasan pengayakan nuklir dunia.

Kemhan dan Kemlu sejalan bahwa pembahasan Non Nuclear Poliferation (NNP) harus bertujuan untuk memperkuat safeguards verification mechanisms dan dilakukan secara transparan, inklusif, dan akuntabel.

Keanggotaan Indonesia pada Board of Governors (BoG) IAEA untuk periode 2023-2025 akan digunakan untuk terus berperan aktif dalam mendorong pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Indonesia mendorong AUS, UK, US untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga

perdamaian sesuai dengan TAC dan SEANWFZ Indonesia juga menekankan pentingnya

penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

1. Isu Papua : salah satunya mendukung masuk dalam forum SPDMM………………….
2. Isu lainnya……….
3. Kebijakan Luar Negeri

kebijakan luar negeri mengusung prinsip "good neighbor policy", yang menekankan pada kerjasama dengan negara-negara mana pun tanpa terikat oleh blok politik tertentu. Hal tersebut menekankan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dalam blok negara manapun dan terbuka untuk bekerja sama dengan negara lainnya. Selain itu juga menyoroti pentingnya menghormati kekuatan negara-negara besar, pertarungan, dan rivalitas antar negara. Dalam hal tersebut kebijakan luar negeri Indonesia akan berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan semua negara, termasuk AS dan Tiongkok, untuk menciptakan kondusivitas dan stabilitas yang berdampak positif pada pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Meski demikian, juga menegaskan bahwa Indonesia harus menghormati dan mempunyai hubungan baik dengan negara-negara seperti India dan negara-negara Islam. Dalam konteks ini, Indonesia berposisi sebagai negara yang memiliki banyak teman namun sedikit musuh.

1. Kebijakan Pertahanan

Kebijakan pertahanan tertuang dalam misi Asta Cita yakni Asta Cita ke- 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”. Dalam Asta Cita ke-2 disebutkan terdapat 18 Program Kerja Sistem Pertahanan dan Keamanan negara:

a. Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata TNI.

b. Mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri.

c. Memperkuat konsep dan praktik wawasan Nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat Komponen Cadangan.

d. Melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi di daerah- daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme.

e. Meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.

f. Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI.

g. Mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparat penegak hukum, dan melakukan kampanye sosial-kultural secara menyeluruh.

h. Memperkuat sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

i. Memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar.

j. Meningkatkan profesionalisme pengadaan, kemampuan transfer teknologi, profesionalisme prajurit dengan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri.

k. Memastikan frekuensi publik dimanfaatkan sebagai akses informasi yang objektif dan kredibel untuk meningkatkan kesatuan antar warga.

l. Mengembalikan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional.

m. Menjalankan strategi smart diplomacy dalam menjamin kebutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

n. Meningkatkan layanan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia di luar negeri.

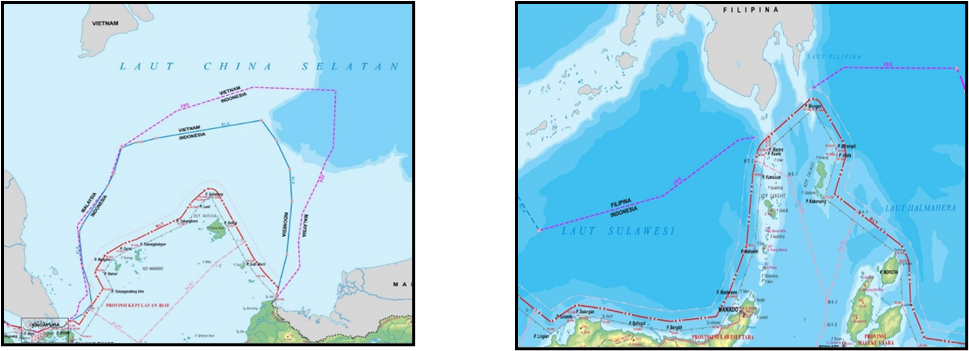
o Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

p. Memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan KBRI di Palestina.

q. Melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi.

r. Memantapkan supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas-aktif.

1. Kebijakan penetapan perbatasan dengan negara-negara berbatasan dengan Indonesia pada prinsipnya sejalan dengan Pemerintah saat ini untuk segera menyelesaikan permasalahnnya termasuk RI – Vietnam terkait dengan ZEE sedangkan RI – Filipina terkait landas kontinen (LK).



1. Kebijakan Kerja Sama Ekonomi (Keberlanjutan Hilirisasi)

menekankan pada pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia dalam bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan energi berbahan baku nabati. Mereka berjanji untuk merevisi aturan yang menghambat investasi baru di sektor EBT, mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta, serta menambah porsi EBT dalam bauran listrik PLN.

Selain itu misi yang diusung adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim dimana dinyatakan bahwa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian dan perikanan wajib dilaksanakan beserta ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan.

untuk melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dengan tujuan agar pembangunan Indonesia menjadi lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa

Kebijakan terhadap Inisiatif IPEF (AS), BRI (Tiongkok), BRICS, OSA (Jepang)

mengusung misi untuk mengembangkan program-program pembiayaan inovatif (innovative financing) untuk menarik investasi ke dalam negeri sebagai bagian dari program industrialisasi dan hilirisasi. Dalam konteks ini disebutkan bahwa Indonesia perlu menjaga perdagangan bebas pada prinsipnya, namun perlu juga menekankan pada prinsip lain yang sangat penting, yaitu prinsip lapangan bermain yang adil, prinsip keadilan. Hal ini berlaku seluruhnya terhadap inisiatif yang ditawarkan baik oleh AS, Tiongkok, Jepang, dan inisiatif lainnya.

Sementara terkait BRICS, akan membuka peluang membawa Indonesia bergabung ke blok ekonomi BRICS apabila hal itu dinilai akan menguntungkan bagi kepentingan ekonomi Indonesia dengan menekankan bahwa mengatakan opsi bergabungnya Indonesia ke BRICS tidak bertentangan dengan prinsip non-blok politik luar negeri Indonesia, karena BRICS bukanlah aliansi geopolitik, melainkan perkumpulan ekonomi seperti halnya G-20 dan APEC.

1. Kebijakan terhadap Isu Uyghur

Indonesia mencoba memberikan bantuan nyata melalui pendekatan diplomatis dengan pemerintah Tiongkok, dimana Indonesia mengutamakan persahabatan untuk bisa mengirimkan delegasi ke sana.

1. Kebijakan terhadap the New Southbound Policy

Kemhan menyikapi Isu Taiwan dengan menghormati “One China Policy” sesuai resolusi PBB, menurut data Badan Imigrasi Taiwan pada November 2023, WNI merupakan pemukim asing terbesar di Taiwan, yakni 39 persen dari total warga asing di Taiwan dengan jumlah 277.564 orang. Pemerintah Indonesia perlu secara serius mengawasi situasi di Selat Taiwan serta harus memiliki mekanisme perlindungan WNI yang baik dan terencana, terutama dalam situasi darurat, di mana tensi antar selat mengalami peningkatan. Mengingat Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik Taiwan, stagging point perlu dipertimbangkan sebagai upaya penyelamatan awal dalam Non-Combatan Evacuation Operation (NEO).

Peran Kementerian yang Dipentingkan dan Menanggung Jawab Komunikasi dengan AS dan Tiongkok

menegaskan komitmen terhadap kebijakan luar negeri yang proaktif dan strategis khususnya dalam konteks hubungan dengan Tiongkok dan AS. Dalam hal ini Kemlu akan menjadi kunci dalam menjaga hubungan dengan Tiongkok dan AS. Kemlu memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia. Kemlu akan bertanggung jawab atas diplomasi bilateral dengan Tiongkok dan AS, termasuk mengelola kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan antara Indonesia dengan kedua negara tersebut. Kemlu juga akan memainkan peran penting dalam mengimplementasikan prinsip "good neighbor policy" yang menekankan kerjasama tanpa terikat oleh blok politik tertentu.

1. Menangani Hubungan dengan Oposisi dan Kekuatan Islam Radikal

Menhan Prabowo menggambarkan pengalaman pribadinya dalam menghadapi rivalitas politik dengan Jokowi pada pemilihan umum sebelumnya sebagai pembelajaran yang positif. Dalam menyikapi hasil pemilu, Prabowo menekankan pentingnya rekonsiliasi politik dan memastikan bahwa sebagai calon presiden, ia akan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang mungkin berseberangan dengan pandangan politiknya. Sikap inklusif ini mencerminkan komitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan oposisi dan mengusung semangat perdamaian serta kerjasama dalam memimpin negara ke depan.

Sementara itu, dalam menangani kekuatan Islam radikal, menegaskan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip negara demokratis yang inklusif dan menghormati kebebasan beragama melaui upaya untuk mengurangi ketegangan dengan mengadopsi pendekatan yang mempromosikan dialog antaragama, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan masalah sosial yang mendasari radikalisasi.

1. Kebijakan RCEP.

Pada tanggal 30 Agustus 2022, DPR RI setuju untuk mengesahkan undang-undang yang meratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), UU RI nomor 24 tahun 2022, tentang pengesahan Regional Economic Partnership Agreement (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional) perjanjian perdagangan bebas regional terbesar di luar Organisasi Perdagangan Dunia – yang melibatkan 10 negara ASEAN dan lima negara non-ASEAN, yaitu, Tiongkok, Selandia Baru, Australia, Jepang, dan Korea Selatan.

Dalam penerapan RCEP di Indonesia, pihak swasta Indonesia masih menghitung dan mempertimbangkan apakah dapat memanfaatkan yang ditawarkan oleh RCEP, diantaranya :

- Kebijakan persaingan dan perlindungan konsumen, mereka harus mengharapkan lebih banyak harmonisasi undang-undang dan kerja sama yang lebih besar antara otoritas terkait di negara-negara anggota, yang dapat menimbulkan tantangan kepatuhan tambahan untuk operasi mereka di negara-negara anggota:

- Perencanaan dan mitigasi bea masuk: RCEP bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan bea masuk yang dikenakan oleh masing-masing negara anggota terhadap barang asal sekitar 92% selama 20 tahun. Secara khusus, dunia usaha dengan rantai pasokan yang melibatkan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan mungkin memperhatikan bahwa RCEP membangun hubungan perdagangan bebas antara ketiga negara tersebut untuk pertama kalinya.

- Optimalisasi rantai pasokan lebih lanjut: Ketika RCEP mengkonsolidasikan anggota perjanjian ASEAN +1 yang ada dengan lima negara anggota non-ASEAN, hal ini akan mempermudah pemenuhan persyaratan kandungan nilai regional melalui aturan akumulasi. Dengan demikian, dunia usaha dapat menikmati pilihan sumber daya yang lebih besar serta memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengoptimalkan proses manufaktur mereka di 15 negara anggota.

- Tindakan non-tarif: Tindakan non-tarif terhadap impor atau ekspor antar negara anggota dilarang berdasarkan RCEP, kecuali sesuai dengan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian WTO atau RCEP. Pembatasan kuantitatif yang diberlakukan melalui kuota atau pembatasan perizinan pada umumnya harus dihilangkan.

- Fasilitasi perdagangan: RCEP menetapkan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan transparansi, termasuk prosedur bagi eksportir yang disetujui untuk membuat pernyataan asal; transparansi seputar prosedur impor, ekspor dan perizinan; penerbitan keputusan terlebih dahulu; perizinan bea cukai yang cepat dan perizinan kiriman ekspres yang dipercepat; penggunaan infrastruktur TI untuk mendukung operasional kepabeanan; dan langkah-langkah fasilitasi perdagangan untuk operator resmi. Untuk perdagangan antar negara tertentu, fasilitasi perdagangan yang lebih besar mungkin diharapkan karena RCEP memperkenalkan opsi untuk melakukan sertifikasi mandiri atas asal barang melalui deklarasi asal, karena sertifikasi mandiri mungkin tidak tersedia berdasarkan perjanjian ASEAN +1 tertentu (misalnya, ASEAN- FTA Tiongkok).

- Persaingan dan perlindungan konsumen: RCEP menyediakan pertukaran informasi di antara otoritas persaingan negara-negara anggota dan memungkinkan adanya koordinasi dalam tindakan penegakan hukum yang diambil oleh mereka. Bab ini juga mengatur kerjasama teknis untuk meningkatkan kapasitas dalam penegakan hukum persaingan usaha. Kerja sama juga diberikan untuk hal-hal yang menjadi kepentingan bersama terkait perlindungan konsumen.

- E Commerce: Menetapkan bahwa para pihak akan mengadopsi atau mempertahankan kerangka hukum yang kondusif bagi e-commerce, termasuk dalam penerapan undang-undang untuk melindungi privasi data dan konsumen e-commerce. Para pihak juga sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk untuk transmisi elektronik.

1. Kebijakan pelatihan Patroli bersama.

Dalam kegiatan dibawah ADMM kegiatan Bersama dalam keamanan maritim beberapa kali telah dilakukan, sesama militer ASEAN bisa dilakukan dengan ASEAN dan AS, atau ASEAN dan Tiongkok, konteks Latihan patrol Bersama bukan merupakan hal yang dilarang sangat berbeda dengan secara operasional dilakukan patrol Bersama, hal ini lebih bersifat terbatas pada wilayah-wilayah tertentu.

Di negara-negara ASEAN hal yang telah dilakukan selama ini secara operasional dapat dilakukan secara bilateral, trilateral atau multilateral. Seperti contoh saat ini berjalan secara rutin adalah patrol maritim Bersama di selat Malaka dikenal dengan Malacca Sea Patrol (MSP) dilaksanakan oleh negara Indonesia, Singapore, Malaysia dan Thailand dan Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) Indomalphi dilaksanakan oleh tiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina juga melaksakan patrol Bersama. Dalam patrol Bersama di negara-negara sesame ASEAN dilaksanakan dengan metode Patroli Terkoordinasi atau dikenal dengan Coordinate Patrol (Corpat) dengan selalu menghormati hukum laut internasional UNCLOS 82.

1. Kebijakan Kontra Terorisme.

Undang-Undang No.5 Tahun 2018 adalah UU tentang tindak pidana terorisme. Undang-undang ini menjadi aturan hukum khusus yang hingga saat ini dipakai dalam penanganan kasus-kasus terorisme di Indonesia.

Secara institusi di Indonesia Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab secara kebijakan dalam melawan aksi terorisme adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang secara operasional dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror POLRI. Dalam penanggulangan aksi terorisme TNI dapat membantu tugas terkait penanganan aksi terorisme sesuai dengan undang-undang TNI Dimana TNI melaksanakan Operasi Selain Perang (OMP) salah satunya membantu penanganan aksi teroris.

Di Tingkat Kemhan, ada Kerjasama dari level kebijakan antar Kementerian pertahanan ASEAN yaitu ASEAN Our Eyes (AOE), dan di level Angkatan bersenjata ASEAN ada CTIF ( Counter Terrorism Information Center).